

**FORM IKK LPPD PROVINSI SULAWESI SELATAN AKHIR TA 2022**  
**SESUAI PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020**

NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTPUT	KET.
	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)  Realisasi Perikanan Tangkap = <b>436.735,7 ton</b> Perikanan Budidaya = <b>4.095.934,7 ton</b>  Target Perikanan Tangkap = <b>404.932,2 Ton</b> , Target Produksi Perikanan Budidaya = <b>4.093.705,8 Ton</b>	$= \frac{4.532.670,4}{4.498.638} \times 100$  <b>= 100,8 %</b>	1)	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)	Jumlah WPP yang telah melaksanakan upaya pengelolaan di laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan	1 (713) WPP	Jumlah Produksi Perikanan yang sudah di Validasi Nasioanal tahun 2023
				2)	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT	Jumlah izin usaha Perikanan Tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan Provinsi per tahun	444	
				3)	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar oprasinoal $\frac{13}{19} \times 100\%$ jumlah seluruh pelabuhan perikanan Standar operasional antara lain : 1) Telah operasional 2) Penetapan kelas oleh MKP 3) Memiliki kelembagaan 4) Memiliki syahbandar di pelabuhan perikanan atau petugas kesyahbandaran 5) Menyusun WKOPP 6) Menerapkan CPIB	68.4%	Salah satu faktor penghambat adalah beberapa pelabuhan belum memiliki penetapan kelas yaitu hanya 2 Pelabuhan yang sudah Penetapan Kelas dan saat ini masih dalam proses pengusulan penetapan kelas, juga terbatasnya SDM untuk penetapan kelembagaan sesuai Pergub nomor 67 Tahun 2020
				4)	Jumlah izin \pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT s/d 30 GT dalam 1 tahun	SIUP = 444 Unit Kapal BPKP = 552 Unit Kapal  Ket : SIUP : 10 - 30 GT BPKP : >5 - 10 GT	
				5)	Jumlah kapal yang+G12 terdaftar	Jumlah kapal perikanan yang terdaftar di atas 5 GT s/d 30 GT dalam satu tahun	1020 Unit Kapal	
				6)	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi yang diterbitkan	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang diterbitkan per tahun	26	

NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTPUT	KET.
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	$x = \sum_{i=1}^n \left( \frac{ci}{si} \right) . 100\%$ <div><math display="block">x = \sum_{i=1}^n \left( \frac{ci}{si} \right) . 100\%</math></div> <p>Keterangan: x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ci: jumlah pelaku usaha KP yang patuh s_i: jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa i: jenis komponen pelaku usaha KP n: jumlah komponen pelaku usaha KP</p>	94,01	1)	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku $\frac{579102,85}{9.439.985} \times 100 \%$ luas wilayah laut dan pesisir yang dimiliki	6.13%	Luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah (1) kawasan konservasi yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri KKP RI yaitu seluas 569.269,57 Ha. 2) Luas rehabilitasi mangrove dan terumbu karang sampai dengan tahun 2022 seluas 226,34 Ha
				2)	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan koservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	Jumlah Kawasan Konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil yang dikelola secara efektif $\frac{5}{7} \times 100\%$ keseluruhan kawasan konservasi perairan yang dimiliki	71,42 %	Realisasi jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara efektif adalah 5 kawasan yaitu 2 kawasan sudah ditetapkan sesuai Kepmen KKP RI dan 3 Kawasan menunggu/proses penetapan Keputusan Menteri. Jumlah seluruh kawasan konservasi perairan adalah 7 kawasan
				3)	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	403	
				4)	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya	5	
				5)	Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	9	

NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTPUT	KET.
				6)	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	9	
				7)	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	75 Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawasan)	
				8)	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 Daerah Provinsi yang diterbitkan	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	3 izin usaha yang diterbitkan	

Makassar, Maret 2023  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Sulawesi Selatan



**Dr. M. ILYAS, ST., M.S.Sc**  
**Nip. 19700606 199603 1 006**